

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PUBLIK  
TERHADAP PEMBANGUNAN  
(STUDI KASUS PADA NEGARA-NEGARA ASEAN-4)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Ade Zul Akhir Lubis  
0910212001**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA NEGARA-NEGARA ASEAN-4)**

Yang disusun oleh :

Nama : Ade Zul Akhir Lubis  
NIM : 0910212001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Juli 2013.

Malang, 2 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

**Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.**

NIP. 19620315 198701 1 001

**Pengaruh Pengeluaran Publik terhadap Pembangunan  
(Studi Kasus pada Negara-Negara ASEAN-4)**

**Ade Zul Akhir Lubis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: zoeldeakhls@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran publik sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur terhadap pembangunan dengan menggunakan indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi pada negara-negara ASEAN-4 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada tahun 2007 s.d. 2011. Berdasarkan tujuan tersebut, metode analisis data yang digunakan adalah Three Stages Least Square (3SLS) dengan menggunakan variabel Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Infrastruktur, dan Investasi sebagai variabel predetermined dan Pendapatan Perkapita, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel endogen.*

*Dari hasil estimasi dan uji statistik diperoleh bahwa pengeluaran publik ketiga sektor tersebut berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Sementara Investasi bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diketahui dari hasil uji statistik yang positif dan signifikan, tetapi tidak berpengaruh dalam peningkatan IPM secara langsung pada model penelitian ini karena investasi yang digunakan adalah investasi secara keseluruhan yang tidak khusus untuk investasi human capital.*

*Kata kunci: Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Infrastruktur, IPM, Pertumbuhan Ekonomi.*

---

**A. PENDAHULUAN**

Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara saat ini menjadi semakin penting karena mekanisme pasar yang menjadi andalan kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat krisis ekonomi sudah kerap kali terjadi. Aliran Keynesian sebenarnya telah mempunyai keyakinan akan munculnya krisis tersebut dengan argumen bahwa pasar tidak mampu menyelesaikan masalah permintaan dan penawaran. Aliran ini berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena adanya masalah yang sistemik yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu, Keynes menyarankan agar peran negara dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan.

Besar kecilnya peran tersebut dilihat dari besar kecilnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui regulasi dan kebijakan fiskal setiap tahun. Regulasi dibutuhkan untuk mengatur seluruh pelaku ekonomi khususnya swasta agar selalu berada dalam mekanisme dan kondisi perekonomian yang diinginkan. Disamping itu, kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam bentuk anggaran pengeluaran publik menjadi alat pemerintah untuk membiayai semua kegiatan pemerintah dan penyediaan barang publik yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemikiran kaum Neoklasik yang sudah membuka kesempatan bagi pemerintah suatu negara untuk mengelola penyediaan barang publik karena alasan efisiensi.

Pertentangan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian ini berlanjut pada ranah akademisi dan *research*, dimana berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh pengeluaran publik terhadap pembangunan ekonomi terdapat dua pendapat yaitu: *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa pengeluaran publik sudah efektif dan efisien dapat meningkatkan pembangunan. Hasil penelitian ini antara lain diperoleh Highum (2006), Kotakorpi dan Laamanen (2007), Guisan dan Exposito (2010), Hessami (2010), Kim (2011), dan Kiya (2012). *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa pengeluaran publik belum efektif dan efisien

dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Scully (2001), Bjornskov (2005), Eiji (2009), dan Kim (2011).

Peneliti yang menghasilkan hubungan positif antara pengeluaran publik dengan pembangunan, mengatakan bahwa sektor-sektor pengeluaran publik yang dinilai memiliki peran besar dalam pembangunan suatu bangsa karena kemampuannya mendorong kesejahteraan masyarakat adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Highum (2006) lebih lanjut menjelaskan bahwa lebih penting menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik daripada “*government size*” yang memasukkan semua komponen pengeluaran. Pendapat ini disetujui oleh Kim (2011) yang mengatakan bahwa anggaran pemerintah atau pengeluaran bukanlah sesuatu yang baik untuk mewakili pemerintah apabila anggaran atau pengeluaran yang dipakai tidak tepat karena akan menghasilkan kesimpulan yang salah dalam melihat hubungan antara pemerintah dengan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran publik yang dialokasikan untuk ketiga sektor tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sasarannya. *Pertama*, pengeluaran yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sasaran ini dapat diwujudkan melalui pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan karena kedua sektor ini menyangkut kebutuhan dasar manusia. *Kedua*, pengeluaran yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan membenahi sektor infrastruktur karena seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan pendapat Kessedes (1993) yang menyebutkan bahwa infrastruktur memberi manfaat bagi perekonomian secara mikro dan makro.

Pembagian pengeluaran publik yang didasarkan pada pengembangan SDM dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan di atas sesuai dengan pendapat Kuncoro (2006) tentang indikator kunci pembangunan yang terdiri dari: (1) indikator sosial berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indeks kualitas hidup lainnya, dan (2) indikator ekonomi berupa PDB, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDB per kapita riil.

Indikator ekonomi sudah digunakan sejak lama oleh negara-negara dalam mengukur pencapaian pembangunan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ukuran ekonomi saja tidak mampu menjelaskan pembangunan suatu bangsa sehingga dibutuhkan indikator lain yang menyangkut pencapaian sosial masyarakatnya. Sehingga saat ini setiap negara berlomba-lomba menjaga pertumbuhan ekonominya sekaligus menciptakan masyarakat yang berkualitas. Pencapaian kedua indikator ini untuk negara-negara ASEAN pada tahun 2012 terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN terbagi kedalam tiga kelompok yaitu: (1) negara dengan penghasilan tinggi dan IPM tinggi yaitu Singapura dan Brunei Darussalam; (2) negara dengan penghasilan menengah dan IPM menengah yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina; dan (3) negara dengan penghasilan rendah dan IPM rendah yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.

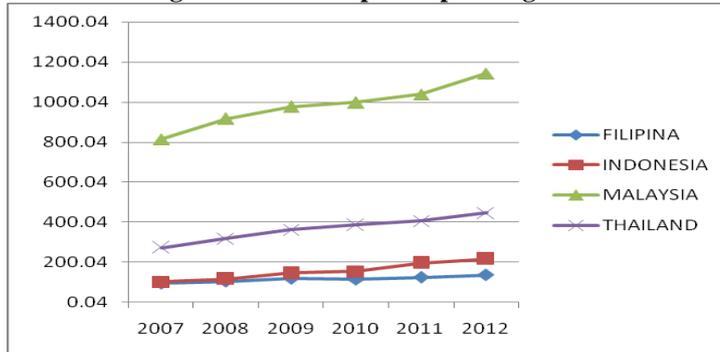
**Tabel 1: PDB per Kapita dan IPM Negara ASEAN Tahun 2012**

NO.	NEGARA	PDB PER KAPITA (US\$/JIWA)	IPM
1.	Singapura	46,241.00	0,895
2.	Brunei Darussalam	41,127.00	0,855
3.	Malaysia	10,381.00	0,769
4.	Thailand	5,474.00	0,690
5.	Indonesia	3,557.00	0,629
6.	Filipina	2,588.00	0,654
7.	Vietnam	1,596.00	0,617
8.	Laos	1,399.00	0,543
9.	Kamboja	943.00	0,543
<b>10.</b>	<b>High</b>	<b>41,061.85</b>	<b>&gt; 0,710</b>
<b>11.</b>	<b>Middle</b>	<b>4,587.61</b>	<b>&gt; 0,536</b>
<b>12.</b>	<b>Low</b>	<b>582.47</b>	<b>&gt; 0,297</b>

Sumber: World Bank dan UNDP, 2013

Negara-negara ASEAN yang termasuk dalam kelompok menengah yang terdiri dari Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina menjadi perhatian dalam penelitian ini. Karena disamping mempunyai kesamaan pencapaian pada kedua indikator pembangunan tersebut, keempat negara ini juga mempunyai kesamaan potensi dalam perekonomian berupa pasar yang besar karena mempunyai jumlah penduduk yang banyak, tempat yang strategis untuk berinvestasi dengan iklim politik yang stabil, dan ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Oleh sebab itu, keempat negara tersebut kurang lebih mempunyai strategi yang sama dalam menerapkan regulasi dan pengalokasian anggaran pengeluaran publik. Hal ini terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa pengeluaran publik per kapita keempat negara selama kurun waktu 2007 s.d. 2012 mempunyai *trend* yang meningkat.

Gambar 1: Pengeluaran Publik per Kapita Negara ASEAN-4 Tahun 2007 – 2012



Sumber: Asian Development Bank, 2012

Berdasarkan data empiris dan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran pemerintah melalui anggaran pengeluaran publik dalam percepatan pembangunan dengan menggunakan indikator sosial berupa IPM dan indikator ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran publik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengeluaran yang dapat meningkatkan kualitas SDM berupa pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Disamping kedua pengeluaran tersebut juga menggunakan pengeluaran infrastruktur yang dapat meningkatkan volume perdagangan dan diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Perlu diadakan analisis lebih mendalam mengingat pentingnya pembangunan yang mencakup kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara ASEAN-4.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh pengeluaran publik terhadap IPM di negara-negara ASEAN-4?
- Bagaimana pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-4?

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- Mengetahui pengaruh pengeluaran publik terhadap IPM di negara-negara ASEAN-4.
- Mengetahui pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-4.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Peran Negara dalam Pembangunan (Anggaran)

Kuncoro (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berbasis pengembangan SDM mulai diterapkan oleh negara-negara berkembang pada akhir dasawarsa 1960-an setelah menyadari bahwa "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pembangunan ekonomi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan karena pertumbuhan merupakan salah satu syarat dalam pembangunan. Senada dengan pendapat

Kuncoro, Todaro (2000) memandang pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Setuju dengan pendapat Profesor Goulet, Todaro juga menambahkan bahwa ada tiga nilai pembangunan yang diperoleh dari usaha untuk menciptakan suatu konsep pembangunan yang berkesinambungan menuju atas masyarakat yang lebih baik dan lebih manusiawi. Ketiga nilai inti tersebut yaitu: (1) kecukupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) jati, diri menjadi manusia seutuhnya; (3) kebebasan dari sikap menghamba yaitu adanya kemampuan untuk memilih.

Secara umum, pandangan ekonom tentang peranan negara dalam pembangunan perekonomian sangat beragam dan secara garis besar dibedakan atas empat macam berdasarkan aliran dan pendekatan (Caporaso, 1992). *Pertama*, sistem ekonomi liberal sebagai penganut aliran ekonomi klasik, yang tokohnya adalah Adam Smith, menyatakan bahwa semua urusan perekonomian harus mengikuti mekanisme pasar. *Kedua*, kebalikan dari pendapat sebelumnya, Karl Marx dalam aliran marsisme berpendapat bahwa semua urusan perekonomian dikerjakan oleh pemerintah yang berkuasa. *Ketiga*, aliran neoklasik mengembangkan pemikiran aliran klasik dengan menambahkan penyediaan dan pengaturan barang publik diluar masalah kepastian hak kepemilikan dan eksternalitas. *Keempat*, Keynes mengkritik aliran klasik mengenai mekanisme pasar. Keynes berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena masalah yang sistemik yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan penawaran.

Berdasarkan pandangan tersebut, saat ini kebanyakan negara menggunakan sistem liberal tetapi tetap mempertahankan peran negara sebagai penentu kebijakan utama. Peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam mengatur perekonomian suatu negara. Mangkoesoebroto (1993) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian modern dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi, untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peran distribusi, yaitu untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan secara merata yang salah satunya melalui mekanisme pajak; (3) peran stabilisasi, yaitu menjaga agar perekonomian yang dijalankan oleh swasta tetap kondusif dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Sejalan dengan peranan tersebut, Burkhead dan Miner (2009) mengatakan bahwa tujuan ekonomi yang hendak dicapai oleh sektor publik secara garis besar terdiri dari empat macam yaitu: (1) mengalokasikan sumberdaya dengan efisien, (2) stabilisasi kegiatan ekonomi, (2) pemerataan distribusi pendapatan, dan (4) promosi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien tersebut, pemerintah mengambil alih hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta seperti pengadaan barang publik. Cornes dan Sandler (1996) mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana untuk barang publik karena swasta gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dalam menyediakan barang tersebut. Oleh sebab itu, Musgrave (1993) menyarankan bahwa proses politik suatu negara hendaknya digunakan untuk (1) mengungkapkan preferensi masyarakat yaitu memberitahukan kepada pemerintah barang sosial apa yang harus disediakan, dan (2) melengkapinya dengan sumber-sumber fiskal yang dibutuhkan untuk membayar barang-barang sosial itu.

Sependapat dengan aliran neoklasik, Batina dan Ihuri (2005) menyatakan bahwa sektor publik memiliki peran penting dalam penyediaan barang-barang yang secara umum dapat mendukung aktivitas sektor swasta. Barang-barang yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk publik yang dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat termasuk dalam bidang pertahanan negara, melindungi hak kepemilikan dengan menyediakan sistem kelembagaan hukum dan kepolisian, menyediakan infrastruktur yang dapat mengurangi biaya transportasi, menyediakan standard nasional untuk media pertukaran seperti mata uang, menyediakan sistem kesehatan secara umum seperti penyediaan udara dan air bersih serta sanitasi dan kekebalan terhadap penyakit, dan membiayai penelitian-penelitian berbasis kemasyarakatan.

Kehadiran barang publik menjadi salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan kualitas hidup. Cowen (1999) mengatakan bahwa elemen dari barang publik terdiri dari dua yaitu: *nonexcludability* (tanpa pengecualian) dan *nonrivalrous* (tanpa persaingan). *Nonexcludability* mengacu pada ketidakmungkinan mencegah orang-orang yang tidak mengeluarkan biaya untuk menikmati keuntungan dari barang dan pelayanan publik, dan *nonrivalrous* mengacu pada tidak berkurangnya kemampuan dan kesempatan setiap individu untuk memperoleh barang dan jasa publik apabila terjadi pertambahan konsumen. Holcombe (1997) yang mengacu pada Samuelson menyebutkan *nonrivalrous* menjadi *jointness* dengan pengertian yang kurang lebih sama yaitu

konsumen baru dapat mengkonsumsi barang publik tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian, barang publik dapat dinikmati secara bersama-sama (kolektif) dengan tidak ada pengecualian.

### **Pembangunan berbasis *Human Capital***

Milbrath dalam Yonk dan Reilly (2011) menyatakan bahwa informasi kualitas hidup sangat berguna dalam mengambil kebijakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh indikator sosial dibanding indikator ekonomi. Diantara kelebihan tersebut adalah : kemampuannya dalam mengidentifikasi berbagai prediksi, mengandung bobot atas nilai-nilai yang diteliti, memberikan informasi bersifat sebab dan akibat atas masalah yang diteliti, hasil yang diperoleh lebih kualitatif bukan sekedar angka-angka kuantitatif sehingga pengambil kebijakan dapat mengambil alternatif penyelesaian yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks pemerintahan suatu negara, konsep kualitas hidup dipergunakan lebih luas pada tingkatan politis dan strategis. Cummins dalam Rapley (2003) mengatakan bahwa konsep kualitas hidup telah mengalami perjalanan mulai dari sebuah istilah sampai pada tujuan-tujuan yang bersifat politik dalam sebuah kehidupan masyarakat bernegara yang kompleks melalui sebuah periode yang didalamnya terjadi proses sosial dan ilmiah pada tingkatan individu dan masyarakat. Perjalanan panjang konsep kualitas hidup ini didasari dan diikuti oleh berbagai kepentingan mulai dari pihak akademisi, peneliti, praktisi, sampai pada kebutuhan informasi strategis suatu negara.

Oleh karena konsep kualitas hidup dipergunakan hampir oleh semua aspek kehidupan dan disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia, maka setiap ahli atau praktisi yang menggunakan konsep ini selalu mendefinisikannya sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini juga yang membuat tidak adanya definisi yang seragam terhadap kualitas hidup. Wollny dkk. (2010) menyebutkan bahwa lebih mudah mengidentifikasi konsep kualitas hidup daripada mendefinisikannya karena setiap bidang dan ahli mempunyai pemahaman yang sama terhadap konsepnya sementara definisi dan penggunaannya sangat beragam. Pendapat ini ditegaskan oleh Hird dalam O'Brien (2008) yang menyatakan bahwa walaupun secara teoritis definisi dari *happiness*, *life satisfaction*, *well-being*, *the good life*, dan kualitas hidup telah banyak diperbincangkan dalam ruang akademisi yang melibatkan banyak disiplin ilmu, tetapi tidak ada definisi kualitas hidup yang disepakati secara umum dan universal.

Dari sudut pandang filosofis, Nussbaum dan Sen dalam O'Brien (2008) mengartikan kualitas hidup sebagai fungsi dari kemampuan dan nilai yang dimiliki oleh manusia untuk semua pencapaian dalam hidupnya. Sebagai institusi internasional yang konsen dalam urusan kesehatan, WHO dalam Beham dkk. (2006) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap posisi kehidupannya dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup, bagaimana hubungannya dengan tujuan hidup mereka yang menyangkut harapan, standar yang digunakan, dan usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam bidang kebudayaan, Menteri Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah Selandia Baru dalam Wollny dkk. (2010) mendefinisikan kualitas hidup sebagai adanya partisipasi dalam rekreasi, kreativitas, dan ikut serta dalam kegiatan kebudayaan lainnya, adanya kebebasan dalam berkarya, menginterpretasi dan mengekspresikan karya seni, sejarah dan peninggalannya, serta tradisi. Sedangkan dalam bidang ekonomi makro suatu negara, Socrates dalam Rapley (2003) menyebutkan bahwa negara yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi ditandai dengan kemakmuran, rendahnya pengangguran, sejahtera secara kejiwaan, tingginya PDB, hidup dengan baik, dapat menikmati hidup, liberal demokrasi, dan hidup secara teratur dan terpola.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan suatu pencapaian kehidupan yang menyeluruh dan menyangkut seluruh aspek kehidupan baik secara objektif/makro maupun secara subjektif/mikro sehingga dengan demikian orang tersebut dapat merasakan kebahagiaan hidup yang seimbang, bebas, berprestasi layak, sehat fisik dan jiwa, dan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam tingkatan hidup secara individu, bermasyarakat, dan bernegara. Wollny dkk. (2010) menyimpulkan bahwa ada enam komponen yang terkandung dalam mendefinisikan kualitas hidup, yaitu: (1) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup; (2) kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang menyangkut adanya kebebasan dan kesempatan; (3) ketersediaan sumber daya alam, sosial, dan budaya; (4) adanya upaya sosial dan politik dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuan seperti fungsi kelembagaan; (5) adanya bukti penelitian seperti kompetensi, otonomi, dan keterkaitan konsep; (6) pendekatan kualitas hidup berhubungan dengan domain ekonomi.

Banyak cara yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup, tetapi yang sangat populer dan banyak digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini pertama kali digunakan oleh *United Nations Development Program* pada tahun 1990 dalam *Human Development Report*. IPM merupakan cara yang ditempuh oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini untuk mengevaluasi pencapaian setiap negara dalam pengembangan sumber daya manusia. Cara ini diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat diaplikasikan untuk setiap negara baik negara maju, sedang berkembang dan negara miskin.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Usia harapan hidup diukur metode tidak langsung (Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi, sedangkan angka melek huruf diperoleh dari kemampuan membaca dan menulis. Komponen standar hidup layak dihitung dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan yaitu PDB perkapita.

Ketiga komponen di atas, mendapatkan bobot yang sama, yaitu sepertiga. Persamaan IPM dapat dituliskan sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Dimana :

X1 : indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan

X2 : indeks angka harapan hidup

X3 : indeks pendidikan =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama bersekolah)

Berdasarkan bobot penilaian seperti diatas yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setiap tahun, PBB memeringkat semua negara yang secara keseluruhan bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah negara-negara yang tingkat pembangunan manusianya rendah (0,0 - 0,50), menengah (0,50 - 0,79), serta negara-negara yang tingkat pembangunan manusianya tinggi (0,80 - 1,0). Namun perlu dicatat bahwa setiap tahunnya IPM hanya mengukur tingkat-tingkat pembangunan manusia relatif, bukan absolut, dan fokusnya adalah pada hasil akhir pembangunan (ketahanan hidup, pengetahuan dan kebebasan pilihan materi atau kualitas standar hidup) bukannya sarana yang semata-mata melihat pendapatan atau GNP per kapita (Todaro, 2000: 88).

### **Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan syarat wajib suatu pembangunan. Pengeluaran publik melalui pembangunan berbagai macam infrastruktur yang tepat diharapkan mampu menambah kapasitas ekonomi dengan memberikan efek multiplier. Dengan menggunakan fasilitas yang tepat, dapat diintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dengan efisien seperti pembangunan jalan dan jembatan. Disamping itu pembangunan infrastruktur dapat mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar. Sehingga dengan jarak yang lebih dekat antara pelaku-pelaku ekonomi dengan pusat-pusat aktivitas perekonomian, akan mengurangi biaya ekonomi.

Kessides (1993) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat infrastruktur terhadap perekonomian, diantaranya adalah: (1) mengurangi biaya produksi, (2) memperluas kesempatan kerja dan konsumsi karena terbukanya daerah-daerah yang terisolasi, dan (3) menjaga stabilitas ekonomi makro melalui investasi pada infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli konsumen.

Robert M. Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan model pertumbuhan Neo Klasik. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja dan memperkenalkan variabel independen ketiga yaitu teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Namun berbeda dengan model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap dengan koefisien baku, model pertumbuhan ini berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang dan input tenaga kerja dan modal jika dianalisis secara terpisah, tetapi jika dianalisis secara bersamaan masih menggunakan asumsi hasil yang tetap (Todaro, 2000).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penanaman penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam penelitiannya, Solow (1957) mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam

pertumbuhan ekonomi adalah sangat tinggi. Candangan teori ini didasarkan pada anggapan analisis klasik, yaitu perekonomian yang tetap mengalami full employment dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sehingga dapat dikatakan sejauh mana perekonomian akan berkembang, tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi. Pada sisi yang lain, teori ini juga memakai asumsi bahwa rasio modal-output (COR) dapat mengalami perubahan atau bersifat dinamis. Maka dapat dikatakan untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan (Arsyad, 2004).

Teori ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang dikemukakan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yaitu :

$$Q_t = T_t^a K_t L_t^b$$

dimana:

$Q_t$  = tingkat produksi pada tahun t

$T_t$  = tingkat teknologi pada tahun t

$K_t$  = jumlah stok barang modal pada tahun t

$L_t$  = Jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

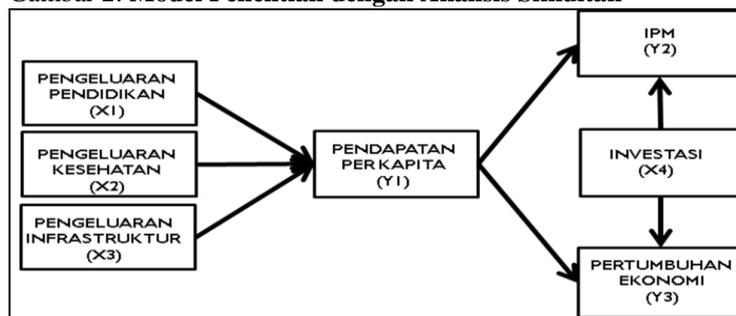
b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai  $T_t$ , a, dan b dapat diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan saja besarnya dengan mengaggap bahwa  $a + b = 1$ , yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 4 Negara Anggota ASEAN (ASEAN-4) yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Metode yang digunakan adalah *Three Stage Least Square (3SLS)* dengan model seperti yang terlihat pada Gambar 2

Gambar 2: Model Penelitian dengan Analisis Simultan



Sumber:

Dari gambar 2 dapat dituliskan beberapa persamaan yang merupakan bagian dari model penelitian sebagai berikut :

a)  $Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots (3.1)$

b)  $Y_2 = a + b_1Y_1 + b_2X_4 \dots\dots\dots (3.2)$

c)  $Y_3 = a + b_1Y_1 + b_2X_4 \dots\dots\dots (3.3)$

dimana :

$X_1$  = Pengeluaran Pendidikan (PEND)

$X_2$  = Pengeluaran Kesehatan (KES)

$X_3$  = Pengeluaran Infrastruktur (STR)

$X_4$  = Investasi (INV)

$Y_1$  = Pendapatan Perkapita (Ycap)

$Y_2$  = IPM

$Y_3$  = Pertumbuhan Ekonomi (TUMR)

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti, maka definisi operasional terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pendidikan (Pend) dan Pengeluaran Kesehatan (Kes), merupakan pengeluaran publik per kapita untuk masing-masing sektor tersebut yang tertera dalam APBN masing-masing negara ASEAN-4 tahun 2007 s.d. 2012 (US \$/jiwa).

$$\text{Pend} = \frac{\text{Pengeluaran Pendidikan}}{\text{Populasi}} \quad \text{Kes} = \frac{\text{Pengeluaran Kesehatan}}{\text{Populasi}}$$

2. Pengeluaran Infrastruktur (Str), merupakan pengeluaran publik untuk sektor infrastruktur yang tertera dalam APBN masing-masing negara ASEAN-4 tahun 2007 s.d. 2012 (US \$).
3. Pendapatan per Kapita (Ycap) merupakan hasil bagi antara Pendapatan Nasional Bruto dengan Jumlah Populasi setiap negara ASEAN-4 tahun 2007 s.d. 2012 (US \$/jiwa).

$$\text{Ycap} = \frac{\text{PDB}}{\text{Populasi}}$$

4. Investasi (Inv) merupakan persentase pembentukan modal dalam negeri setiap negara ASEAN-4 terhadap PDB tahun 2007 s.d. 2012 (%).

$$\text{Inv} = \frac{\text{Pembentukan Modal Bruto}}{\text{PDB}}$$

5. IPM adalah angka yang menunjukkan pencapaian kualitas hidup manusia secara fisik yang dikeluarkan oleh UNDP setiap tahunnya setiap negara ASEAN-4 tahun 2007 s.d. 2012 (0,0 – 1,0).
6. Pertumbuhan ekonomi riil (TUMR) merupakan pertumbuhan ekonomi yang telah dikurangi dengan inflasi untuk setiap negara ASEAN-4 tahun 2007 s.d. 2012 (%).

$$\text{TUMR} = \text{Pertumbuhan Nominal} - \text{Inflasi}$$

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Estimasi dan Uji Statistik

*Three Stage Least Square (3SLS)* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan model simultan. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran publik terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan metode 3SLS karena model analisis data terdiri dari tiga persamaan dan variabel endogen yaitu Pendapatan Per Kapita, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun hasil; estimasinya seperti yang terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Estimasi 3SLS

VARIABEL	COEF.	STD. ERR.	z	P >  z
<b>YCAP (y1)</b>				
Pengeluaran Pendidikan (x1)	4.424198	1.291169	3.43	0.001
Pengeluaran Kesehatan (x2)	27.86984	3.686391	7.56	0.000
Pengeluaran Infrastruktur (x3)	4.78E-08	2.06E-08	2.32	0.021
Constanta	1495.388	156.6218	9.55	0.000
<b>IPM (y2)</b>				
YCAP (y1)	0.000019	1.05E-06	18.37	0.000
Investasi (x4)	-0.002087	0.001663	-1.25	0.209
Constanta	0.062515	0.038134	16.39	0.000
<b>TUMR (y3)</b>				
YCAP (y1)	0.000419	0.000146	2.88	0.004
Investasi (x4)	1.293017	0.237366	5.45	0.000
Constanta	-30.03065	5.441456	-5.52	0.000

Sumber:

Dari *output* hasil pengolahan data pada Tabel 2, dapat dibuat interpretasi terhadap setiap hasil persamaan dalam model sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

- pendapatan per kapita pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,001 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Pengeluaran Pendidikan ( $x_1$ ) sebesar 4,424198 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 pengeluaran pendidikan akan mengakibatkan kenaikan pendapatan per kapita sebesar US\$ 4,424198 dengan asumsi *ceteris paribus*
- 2) Pengeluaran kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Pengeluaran Kesehatan ( $x_2$ ) sebesar 27,86984 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 pengeluaran kesehatan akan mengakibatkan kenaikan pendapatan per kapita sebesar US\$ 27,86984 dengan asumsi *ceteris paribus*.
  - 3) Pengeluaran infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,021 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Pengeluaran Infrastruktur ( $x_3$ ) sebesar 4.78E-08 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 pengeluaran infrastruktur akan mengakibatkan kenaikan pendapatan per kapita sebesar US\$ 4.78E-08 dengan asumsi *ceteris paribus*
  - 4) Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Ycap sebesar 0,000019 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 pendapatan per kapita akan mengakibatkan kenaikan IPM sebesar 0,000019 dengan asumsi *ceteris paribus*.
  - 5) Investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,209 > \text{dari } 0,05$ .
  - 6) Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,004 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Ycap sebesar 0,000419 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 pendapatan per kapita akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000419 dengan asumsi *ceteris paribus*.
  - 7) Investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil pada level 5%. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas t-hitung variabel ini sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Koefisien Investasi ( $x_4$ ) sebesar 1.293017 berarti bahwa setiap kenaikan US\$ 1 investasi akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 1.293017 dengan asumsi *ceteris paribus*.

## **Pembahasan Hasil**

### **Pengaruh Pengeluaran Publik terhadap IPM :**

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh pengeluaran publik terhadap pembangunan dengan menggunakan indikator IPM dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dilakukan adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran publik yang terdiri dari pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran infrastruktur terhadap IPM. Berdasarkan hasil analisis dan hasil hipotesis, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif ketiga pengeluaran publik tersebut terhadap IPM. Data ADB juga menunjukkan fakta bahwa selama periode 2007 s.d. 2012 pengeluaran publik yang dialokasikan negara-negara ASEAN-4 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,5% setiap tahun dengan kenaikan rata-rata IPM sebesar 0,64% per tahun. Hasil studi ini sejalan dengan teori ekonomi publik dalam meningkatkan *human capital*.

Aliran neoklasik menganjurkan agar penyediaan barang publik dilakukan oleh negara karena pihak swasta tidak dapat melakukannya secara keseluruhan dengan efisien. Hal tersebut dilakukan oleh semua negara di dunia pada porsi yang berbeda-beda termasuk negara-negara ASEAN-4. Pengeluaran publik untuk membiayai bidang pendidikan di negara-negara ASEAN-4 sebahagian besar untuk menyediakan pendidikan dasar bagi masyarakat karena disamping pendidikan ini sangat vital dan mendesak sehingga dibutuhkan suatu standar nasional atas kemampuan dasar setiap individu, pihak swasta enggan memasuki area ini karena masalah efisiensi. Begitu juga dengan pengeluaran dibidang kesehatan, fokus keempat negara ASEAN masih kepada masyarakat tidak mampu dalam mengakses kesehatan, sehingga jaminan kesehatan keempat negara tersebut masih berada pada penyediaan kesehatan primer.

Walaupun demikian, alokasi kedua sektor ini baik pendidikan maupun kesehatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Melalui bantuan pendidikan, dapat menambah kapabilitas individu, pengetahuan, keterampilan sehingga terbuka peluang terciptanya inovasi, kreatifitas, dan teknologi-teknologi baru. Bermodalakan atas kemampuan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau bagi sebahagian bahkan mampu

menciptakan usaha sendiri dengan berwirausaha. Dengan demikian, akan tercipta produk-produk baru yang dapat mendatangkan penghasilan secara finansial atau dengan kata lain dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Mekanisme meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengeluaran publik bidang pendidikan tersebut, juga terjadi melalui bidang kesehatan. Dengan adanya bantuan kesehatan, masyarakat dengan mudah mengakses kesehatan dan memperoleh nutrisi tambahan sehingga dapat meningkatkan kesehatan rata-rata masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan ketahanan fisik yang lebih baik. Ketahanan fisik tersebut merupakan salah satu modal bagi setiap individu (*human capital*) dalam mengakses pasar tenaga kerja. Misalnya, pekerja yang sebelum memperoleh bantuan kesehatan bekerja selama 10 bulan setahun, dengan kondisi tubuh yang lebih sehat dan kesiapan dalam menghadapi pekerjaan menjadi semakin tinggi dengan adanya bantuan kesehatan, pekerja tersebut mampu bekerja menjadi 11 bulan setahun. Hasil volume kerjanya tentu menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya sehingga pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat.

Peningkatan kemampuan dasar dan ketahanan fisik masyarakat sebagai modal dasar setiap individu dalam aktivitas perekonomian tidak berhenti sampai disini. Kedua kemampuan ini akan lebih maksimal dan membawa efek yang berkesinambungan apabila diimbangi oleh besarnya kesempatan dalam memasuki dunia usaha. Besarnya kesempatan berusaha ini harus didukung oleh ketersediaan ruang dan fasilitas perekonomian seperti tersedianya pasar, lancarnya akses menuju pasar seperti transportasi, informasi, dan sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN-4 juga mengalokasikan pengeluaran infrastruktur dalam rangka menyediakan fasilitas fisik yang dapat mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Sebagai salah satu contoh, tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan suatu daerah penghasil komoditas dengan konsumennya akan mengurangi biaya transportasi. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi pihak lain untuk memasuki pasar dengan membuat produksi baru sehingga dapat menambah volume perdagangan. Berkurangnya biaya pemasaran dan bertambahnya volume produksi yang diperdagangkan dapat menambah pendapatan per kapita masyarakat.

Telah diuraikan di atas bahwa ketiga pengeluaran publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita otomatis akan meningkatkan preferensi masyarakat terhadap komoditas yang akan dikonsumsi karena setiap masyarakat cenderung menginginkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas sebagai salah satu motivasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, masyarakat akan mengeluarkan pendapatannya untuk mengkonsumsi komoditas yang dapat menambah kualitas hidupnya sehingga dapat meningkatkan kemampuannya sendiri dan keluarganya (*human development*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramirez dkk. pada negara-negara berkembang seperti Brazil, Bolivia, India, Indonesia, Malaysia, dll, menyatakan bahwa pada keluarga dengan pendapatan perkapita rendah, sebahagian besar porsi pendapatannya (lebih setengah dari pertambahan pendapatan) digunakan untuk konsumsi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya seperti konsumsi nutrisi, peningkatan pendidikan, dan kesehatan (*human development*). Hal ini juga yang menjadi temuan dalam penelitian ini bahwa peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena sebahagian besar masyarakat ASEAN-4 masih berada pada kondisi prasejahtera sehingga sebahagian besar pendapatannya masih dipergunakan untuk konsumsi barang-barang primer.

Dengan demikian pengeluaran publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mencerminkan peranan pemerintah sebuah negara dapat meningkatkan IPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti yang diuraikan diatas bahwa masyarakat memperoleh kemampuan dan ketahanan fisik sehingga dapat mengakses pasar tenaga kerja yang diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang tepat. Dan secara tidak langsung sekaligus sebagai dampak positif dari cara sebelumnya, IPM dapat ditingkatkan oleh masyarakat sendiri melalui peningkatan konsumsi yang dapat meningkatkan kualitas hidup karena adanya peningkatan daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian oleh Semmler dkk. (2006), Davies (2009), Guisan dan Exposito (2010), dan Ginanjar (2010) yang mengatakan bahwa ketiga pengeluaran publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya pengeluaran tersebut akan

meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan akhirnya akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pengaruh Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi:**

Peran negara-negara ASEAN-4 melalui pengeluaran publik periode 2007 s.d. 2012 secara empiris ternyata dapat memberikan dampak yang positif dalam rangka menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pengeluaran publik tersebut tergolong kedalam pengeluaran yang dapat meningkatkan SDM (*human capital*) yaitu pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan dan yang dapat meningkatkan volume perdagangan yaitu pengeluaran infrastruktur. Kedua jenis pengeluaran publik yang bertujuan meningkatkan SDM akan berpengaruh pada tersedianya tenaga kerja mumpuni yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan juga didukung dengan kesehatan yang memadai. Ditambah lagi dengan penyediaan sarana fisik yang dapat mendukung investasi. Hal ini sesuai dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan tergantung pada penanaman faktor-faktor produksi yang terdiri dari akumulasi tenaga kerja dan akumulasi modal serta adanya teknologi.

Hasil temuan pada point 4.3.1 merupakan *outcome* yang diperoleh masyarakat dan negara secara makro sebagai hasil dari konsumsi berbagai jenis komoditas. Sedangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari meningkatnya pendapatan perkapita adalah meningkatnya daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli yang ditunjang dengan meningkatnya keinginan untuk konsumsi akan meningkatkan permintaan. Dengan kata lain, meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya daya beli otomatis meningkatkan permintaan agregat. Naiknya permintaan akan direspon dengan naiknya penawaran sehingga meningkatkan aktivitas pasar. Meningkatnya aktivitas pasar terus menerus secara keseluruhan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini juga yang terjadi pada negara-negara ASEAN-4 selama kurun waktu tahun 2007 s.d. 2012. Temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Ramirez, dkk. (1997) yang menyimpulkan bahwa pembangunan SDM melalui pengeluaran pendidikan dan kesehatan signifikan positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Pendapatan Nasional menyatakan bahwa pendapatan nasional merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan ekonomi suatu negara yang terdiri dari konsumsi masyarakat, investasi, aktivitas pemerintah, dan kegiatan ekspor dan impor. Telah menjadi suatu kenyataan bahwa besarnya penduduk ASEAN-4 menjadi salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Karena besarnya penduduk ini menunjukkan besarnya potensi pasar yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini juga yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut khususnya Indonesia yang tetap eksis pada saat terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Walaupun secara fundamental pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi bukanlah cara yang dapat diandalkan selamanya. Disamping itu, besarnya potensi pasar ASEAN-4 telah menjadi daya tarik bagi negara-negara importir untuk memasarkan produk-produk mereka.

#### **Peran Investasi dalam Pembangunan:**

Telah diuraikan di atas bahwa pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator IPM dan Pertumbuhan Ekonomi. Dan telah terbukti bahwa pengeluaran publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kedua indikator pembangunan tersebut. Disamping dipengaruhi oleh pengeluaran publik melalui pendapatan perkapita, kedua indikator pembangunan ini juga masing-masing dipengaruhi oleh variabel investasi. Sesuai dengan hasil yang diperoleh, terdapat perbedaan perilaku investasi dalam mempengaruhi kedua indikator pembangunan tersebut.

Secara empiris, investasi tidak mempengaruhi IPM karena investasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak khusus untuk investasi dalam *human capital*. Oleh sebab itu, modal yang diinvestasikan tidak memberi dampak secara langsung terhadap peningkatann IPM pada tahun yang sama. Tetapi investasi tersebut disisi lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi yang terjadi di ASEAN-4 kurun waktu 2007 s.d. 2012 cenderung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara pengaruh investasi terhadap IPM bisa dilihat melalui peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua sektor usaha secara simultan akan meningkatkan IPM. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramirez, dkk. (1997) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan positif mempengaruhi pembangunan SDM.

Secara fundamental, sebuah perekonomian memang harus ditopang oleh hadirnya investasi. Sesuai dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow yang melihat investasi melalui penanaman modal dan tenaga kerja, disamping menyediakan tenaga kerja yang mumpuni, pemerintah juga harus berusaha meningkatkan iklim investasi untuk menarik investor agar tercipta keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa investasi yang terdapat pada keempat negara ASEAN selama kurun waktu penelitian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil. Investasi ini bukan hanya berasal dari investor dalam negeri sendiri tetapi berasal dari investor asing yang menjalankan usahanya di masing-masing negara. Hasil yang serupa juga diperoleh Nowbutsing (2012) dalam penelitiannya terhadap perekonomian Mauritius yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif atas pembentukan modal bruto khususnya yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Mauritius dengan memperhitungkan kondisi *human capital*, ketersediaan infrastruktur publik, pengembangan sektor keuangan, dan perdagangan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sesuai dengan judul penelitian ini yang bermaksud untuk menganalisis pengaruh pengeluaran publik terhadap pembangunan, maka tujuan yang hendak dicapai diarahkan pada maksud judul tersebut berupa melihat pengaruh pengeluaran publik terhadap indikator-indikator pembangunan. Pengeluaran publik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sektor yaitu pengeluaran publik sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Sementara indikator pembangunan yang digunakan adalah indikator sosial berupa IPM dan indikator ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi. Sehingga tujuan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu untuk menganalisis: (1) pengaruh pengeluaran publik yang terdiri dari pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran infrastruktur terhadap IPM, dan (2) pengaruh pengeluaran publik yang terdiri dari pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil empiris yang diperoleh atas tujuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran publik dapat meningkatkan pembangunan melalui indikator IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN-4. Dengan demikian, ASEAN-4 telah efektif dan efisien mengelola pengeluaran publiknya.
- 2) Pengeluaran publik bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui konsumsi nutrisi yang baik, partisipasi pendidikan, dan kemudahan akses terhadap kesehatan sehingga setiap individu mempunyai ketahanan fisik, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai modal dasar manusia (*human capital*) dalam aktivitas ekonomi baik sebagai tenaga kerja maupun wirausaha.
- 3) Pengeluaran publik bidang infrastruktur membuka akses perdagangan yang semakin luas melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengakomodasi semua kepentingan aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi.
- 4) Pengeluaran publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai preferensi dalam mengkonsumsi yang cenderung lebih baik dan berkualitas. Dengan demikian akan meningkatkan IPM.
- 5) Dampak ekonomis yang ditimbulkan dari meningkatnya pendapatan perkapita adalah meningkatnya daya beli dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga akan meningkatkan permintaan agregat atas komoditas tersebut yang akan mendorong terjadinya investasi yang akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Investasi tidak signifikan mempengaruhi IPM dalam model ini karena data investasi yang digunakan adalah investasi secara keseluruhan yang tidak khusus untuk investasi *Human Capital*. Dengan demikian dampak dari investasi ini tidak dapat mempengaruhi IPM secara langsung pada tahun yang sama melainkan membutuhkan waktu melalui peningkatan pendapatan perkapita kembali atas investasi tersebut dalam proses pertumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya.

## Saran

Atas kesimpulan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dan mengingat fakta bahwa Indonesia mempunyai IPM dan Pendapatan Perkapita paling rendah diantara ketiga negara ASEAN lainnya, maka saran ini lebih tepat untuk pemerintah Indonesia yaitu :

- 1) Perlu diadakan usaha-usaha peningkatan kedua indikator pembangunan tersebut melalui alokasi pengeluaran publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih besar. Tetapi pemerintah menghadapi kendala anggaran. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dengan mengadakan *shifting* dari anggaran untuk pengeluaran administratif menjadi anggaran untuk pengeluaran publik khususnya untuk ketiga sektor tersebut diatas.  
Hal ini terlihat dari masih besarnya alokasi anggaran untuk pengeluaran yang bersifat administratif di Indonesia yang masih mencapai 46,98% pada tahun 2012. Begitu juga untuk Phillipina alokasi anggaran administratif masih mencapai 46,92%. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah menerapkan alokasi anggaran pengeluaran yang efisien dengan alokasi untuk pengeluaran administratif masing-masing hanya sebesar 32,26% dan 27,04%.
  - b) Meningkatkan efektifitas anggaran dengan penajaman perencanaan alokasi anggaran yang terukur. Hal ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan logis sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat, sampai pada tahap pelaksanaan dan pengawasan agar sasaran yang dicapai tidak menyimpang dari perencanaan semula.
- 2) Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dengan memberikan insentif kepada investor khususnya bagi investasi yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sekaligus untuk percepatan peningkatan IPM.

## Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 2004. **Ekonomi Pembangunan. Edisi Ke-4**. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Batina, R.G., Ihuri, T. 2005. **Public Goods Theories and Evidence**. Berlin: Springer.
- Beham, B., Drobnic, S., Verwiebe, R. 2006. **Literature Riview. Theoretical Concepts and Methodological Approches of Quality of Life and Work**. Hamburg: University of Hamburg and Universiteit Utrech.
- Bjornskov, C., Dreher, A., Fischer, Justina A.V. 2005. **The Bigger The Better? Evidence of the Effect of Government Size on Life Satisfaction Around The World. Economic Working Paper Series 05/44**.
- Burkhead, J., Miner. J. 2009. **Public Expenditure. Second Peparback Printing**. Originally Published: Chicago: Aldine, Atherton, 1971, USA.
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. 1992. **Theories of Political Economy**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cornes, R., Sandler, T. 1996. **The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods. Second Edition**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cowen, Tylor. 1999. **Public Goods and Market Failure. A Critical Examination**. New Jersey: Transaction Publisher.
- Davies, Antony. 2009. **Human Development and the Optimal Size of Government. Journal of Socioeconomics**. Vol.35 (No.5): 868-876.

- Eiji, Yamamura. 2009. **The Influence of Government Size on Economic Growth and Life Satisfaction. A Case Study From Japan.** *Munich Personal RePEc Archive.* (No. 17879).
- Ginanjar. 2010. **Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur.** Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Guisan, M.C., Exposito, P. 2010. **Health Expenditure, Education, Government Effectiveness and Quality of Life in Africa and Asia.** *Regional and Economic Studies.* Vol.10 (No.1).
- Hessami, Z. 2010. **The Size and Composition of Government Spending in Europe and Its Impact on Wellbeing.** MPRA Paper (No.21195).
- Highum, E. 2006. **Political Economy and ‘Quality of Life’ in the Early Twenty-First Century: Economic Versus Political Factors.** Makalah disajikan dalam Annual Meeting of the International Studies Association, San Diego, California, USA, March 22 2006.
- Holcombe, R.G. 1997. **A Theory of the Theory of Public Goods.** *Review of Austrian Economics.* Vol.10 (No.1): 1-22.
- Kessides, Christine. 1993. **The Contribution of Infrastructure to Economic Development. A Review of Experience and Policy Implication. Second printing.** Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The world Bank Washington printing.
- Kim, Seoyong, dan Kim, Donggeun. 2011. **Does Government Make People Happy? Exploring New Research Direction for Government’s Roles in Happiness.** *Journal of Happiness Studies An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being.* Vol.7 (No.2): 1389-4978.
- Kiya, Kohei. 2012. **Life Satisfaction and Public Finance: Empirical Analysis Using U.S. Micro Data.** *Department of Economics University of Washington, Seattle WA 98195.*
- Kotakorpi, K., dan Laamanen, J. P. 2010. **Welfare State and Life Satisfaction: Evidence From Public Health Care.** *Economica,* Vol. 33 (No.307): 565–583
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. **Ekonomika Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat.** Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. **Masalah, Kebijakan, dan Politik. Ekonomika Pembangunan.** Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. **Ekonomi Publik Edisi Ketiga.** Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Minea, A. 2008. **The Role of Public Spending in the Growth Theory Evolution.** *Romanian Journal of Economic Forecasting.* (No.2): 98-120.
- Musgrave, R.A. 1993. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi Kelima.** Alih Bahasa oleh Alfonso Sirait, dkk. Penerbit Erlangga.
- Nowbutsing, Bhisum. 2012. **Capital Formation and Economic Growth in Mauritius: Does FDI Matter?** *ICITI 16941225.*
- O’Brien, M. 2008. **Well-Being and Post-Primary Schooling. A Review of the Literature and Research.** Dublin: NCCA.
- Ramirez, A., Ranis, G., dan Stewart F. 1997. **Economic Growth and Human Development.** *Economic Growth Center Yale University, Center Discussion Paper.* (No.787).

- Rapley, Mark. 2003. **Quality of Life Research, A Critical Introduction**. London: Sage Publications Ltd.
- Scully, Gerald W. 2001. **Government Expenditure and Quality of Life**. *Public Choice* (No.108): 123-145.
- Semmler, W., Greiner, A., Diallo, B., Rezai, A., Rajaram, A. 2006. **Public Policy for Economic Growth: Theory and Emperics**. *Public Choice 2006*.
- Todaro, Michael P. 2000. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 7**. Terjemahan oleh Haris Munandar. 2000. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wollny, I., Apps, J., Henricson, C. 2010. **Can Government Measure Family Wellbeing?** London: Family and Parenting Institute printing Ltd.
- Yonk, Ryan M. dan Reilly Shauna. 2011. **Applied Reserach Quality of Life, Citizen Involement & Quality of Life: Exit, Voice and Loyalty in a Time of Direct Democracy**. DOI 10.1007/s11482-011-9142-x.